



Dana Hibah Dikejar Wakil Rakyat

DENPASAR - Janji pemerintah Provinsi mencairkan dana hibah pada Agustus 2016 kembali ditagih. Terlebih dengan rendahnya serapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016, Dewan Bali menegaskan bahwa tak ada lagi alasan pemprov penunda pencairan hibah bagi masyarakat.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali Made Budastra, sudah tidak ada alasan bagi pihak eksekutif tidak mencairkan dana hibah masyarakat. Sebab, anggaran tersebut sudah masuk dalam sistem dan kelengkapannya

sudah diurus masyarakat. "Tidak usah ada pendekatan sana sini lagi, itu sudah masuk sistem dan tugas SKPD masing-masing melakukan proses pencairannya," ujar Made Budastra, Senin (1/8).

Demikian pula anggota Komisi II AA Ngurah Adhi Adarhana. Saat dikonfirmasi terpisah Agung Ardhana mengaakan serapan APBD 2016 yang notabena disebutkan oleh gubernur sampai pada akhir semester pertama ini masih rendah adalah wajar. "Wajar karena dana hibah tidak cair. Kalau

dana hibah Rp 370 miliar bisa dicairkan, maka serapan anggaran pada angka 45 persen tercapai. Sungguh luar biasa itu serapannya sangat tinggi sekali," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan asal Puri Gerenceng Denpasar ini menambahkan, dengan pencairan dana hibah Rp 370 miliar, hal itu akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Infrastruktur akan bergerak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti kerajinan ukir akan banyak pesanan, tukang batu padas dapat order, batu pasir dan

toko bangunan juga akan laris manis. Sebab, dana hibah yang diusulkan masyarakat adalah diperuntukkan pembangunan pura, balai banjar, pengadaan gambelan dan masih banyak lagi.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya juga menyampaikan hal yang sama. Semua anggota dewan berharap agar dana hibah dapat dicairkan Agustus ini. "Masyarakat sudah berkali-kali melakukan perbaikan profosal, dana hibah harus segera dicairkan," pungkasnya. (pra/dit)

Edisi : Selasa, 2 Agustus 2016

Hal : 21



Radar Bali

Dorong Langkah LSM Laporkan KPK

DENPASAR - Belum adanya respon atas laporan dugaan penyimpangan pengelolaan aset di Perusahaan Daerah (PD) Swatantra oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memantik reaksi Dewan Bali. Terlebih dengan sudah dilaporkannya kasus dugaan penyalahgunaan aset itu setahun lalu. Dewan Bali kini menyatakan mendukung agar kasus ini ditindaklanjuti komisi antirasuah KPK.

Seperti ditegaskan salah satu anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Tirtawan. Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Tirtawan selaku wakil rakyat dari Dapil Buleleng menyatakan mendukung langkah LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil Buleleng melapor ke KPK. "Kami mendukung penuh upaya yang dilakukan LSM Peduli Masyarakat Kecil di Buleleng menindaklanjutinya ke KPK agar terbuka kebenaran yang diharapkan masyarakat Buleleng," ujar anggota komisi I DPRD Bali itu, Senin (1/8).

Menurut Tirtawan, pengelolaan aset milik Kabupaten Buleleng yang dikelola PD Swatantra sangat tidak masuk akal pendapatannya sekecil itu. Pengelolaan kebun lewat sistem tender saja hasilnya bisa mencapai Rp 140 juta per hektare. "Bayangkan, kalau hanya hasilnya 50 juta, sisanya dibawa kemana? Tidak heran, banyak kecurigaan dan kekhawatiran bahwa banyak uang yang lenyap. Keuntungan dari pengelolaan perkebunan cengkeh itu masuk ke kantong-kantong oknum pejabat di Buleleng dan PD Swatantra itu sendiri," paparnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Forum Peduli Masyarakat Kecil Kabupaten Buleleng Gde Suwardana yang dikonfirmasi terpisah via telepon menyebutkan, saat laporan disampaikan, memang sudah ada pemanggilan terhadap kepala dinas, Pimpinan PD Swatantra dan pihak terkait. Namun yang ditindaklanjuti adalah temuan dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjadinya penyimpangan dari penyertaan modal pada PD Swatantra senilai Rp 1,2 miliar. "Atas laporan saya untuk melanjutkan pengelolaan aset milik Pemda Buleleng distop dengan alasan belum ada ditemukan alat bukti baru," ujarnya.

Menurutnya dari pengelolaan aset milik Pemda Buleleng terhadap aset perkebunan baik berupa cengkeh maupun kopi yang luasnya mencapai 86 hektar di seluruh kecamatan diprediksi ada pendapatan yang masuk ke kas daerah mencapai Rp 3 miliar bersih setelah dipotong 60 persen sesuai Perda. Realitanya, hanya masuk Rp 50 juta.

Gde Suwardana mengatakan sebagai LSM sudah pernah turun langsung ke lapangan melakukan survey terhadap hasil perkebunan di daerah Mengening dan Tajun, Buleleng Timur. Kebanyakan lahan perkebunan sangat subur sehingga ada estimasi dari hasil surveinya itu dari 40 hektar, setengahnya menghasilkan dan hasilnya mencapai ratusan juta. "Pengelolaan total perkebunan milik Pemda Buleleng lanjutnya, seluas 87 hektar, terdiri kopi, cengkeh dan perkebunan lainnya. Kita prediksi seharusnya ada kontribusi sampai Rp 3 miliar lebih," pungkasnya. (pra/dit)

Edisi : Selasa, 2 Agustus 2016

Hal : 24